



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

### LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

GEDUNG DANADYAKSA, JALAN CIKINI RAYA NO 91, JAKARTA 10330

TELEPON (021) 23951607, FAX (021) 21232519, LAMAN: [lpdp.kemenkeu.go.id](http://lpdp.kemenkeu.go.id)

PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

Nomor : S-92/LPDP/2025 7 Juli 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 4 (Empat) Berkas  
Hal : Penyampaian Informasi Pembukaan Pendaftaran Seleksi Beasiswa  
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahap 2 Tahun 2025

Yth 1. Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia  
2. Pimpinan pada Pemerintah Daerah Provinsi  
3. Pimpinan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Afirmasi  
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta  
5. Pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal  
6. Pimpinan Komisi  
Nasional Disabilitas di  
seluruh Indonesia

Sebagai upaya strategis memberdayakan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, hingga saat ini Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) senantiasa mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) nasional. Pembangunan SDM nasional diwujudkan oleh LPDP antara lain dengan memberikan kesempatan kepada pemuda-pemudi unggul untuk mengembangkan kompetensi, pendidikan, dan riset strategis. LPDP terus berkomitmen mewujudkan visi pembangunan SDM Indonesia melalui pemberian beasiswa yang inklusif untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai komitmen LPDP dalam mewujudkan visi SDM unggul, pada tahun 2025 LPDP kembali membuka program beasiswa dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama telah selesai dilaksanakan pada rentang Januari – Juni 2025 dan pendaftaran tahap kedua dibuka pada bulan Juni/Juli 2025.

Program beasiswa LPDP ditujukan untuk jenjang Master, Doktor, Dokter Spesialis, dan Dokter Subspesialis dengan tujuan studi Dalam Negeri, Luar Negeri serta Double Degree/Joint Degree sesuai dengan daftar Perguruan Tinggi Tujuan di LPDP. Daftar program beasiswa adalah sebagai berikut.

1. Beasiswa LPDP Program Umum
  - a. Beasiswa Reguler Tahun 2025\*
  - b. Beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia Tahun 2025
  - c. Beasiswa Parsial Tahun 2025\*
2. Beasiswa LPDP Program Afirmasi
  - a. Beasiswa Daerah Afirmasi Tahun 2025\*
  - b. Beasiswa Putra Putri Papua Tahun 2025\*
  - c. Beasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2025\*
  - d. Beasiswa Prasejahtera Tahun 2025\*
3. Beasiswa LPDP Program Targeted
  - a. Beasiswa PNS, TNI, POLRI Tahun 2025\*
  - b. Beasiswa Kewirausahaan Tahun 2025
  - c. Beasiswa Pendidikan Kader Ulama Tahun 2025



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## SEKRETARIAT JENDERAL

### LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

GEDUNG DANADYAKSA, JALAN CIKINI RAYA NO 91, JAKARTA 10330

TELEPON (021) 23951607, FAX (021) 21232519, LAMAN: [lpdp.kemenkeu.go.id](https://lpdp.kemenkeu.go.id)

PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON: 134 dan SUREL: [kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id](mailto:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id)

- d. Beasiswa Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis Tahun 2025
  - e. Beasiswa Doktor Talenta Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2025
- (\*dapat memilih program Double/Joint Degree sesuai dengan daftar/list LPDP)

Di samping itu, pada rentang bulan Juni s.d. Desember 2025, LPDP juga akan membuka program beasiswa kemitraan dengan sejumlah Lembaga Pendidikan luar negeri. Informasi lebih lengkap mengenai persyaratan, tahapan serta jadwal pendaftaran/seleksi untuk seluruh program beasiswa terdapat dalam Buku Panduan yang dapat diakses melalui laman resmi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan <https://lpdp.kemenkeu.go.id/>. Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) melalui laman resmi <https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/>. Adapun kanal layanan bantuan dapat diakses melalui call center LPDP melalui nomor 134 atau melalui laman <https://bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id/>.

Lebih lanjut, melalui surat ini kami harapkan dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk dapat meneruskan dan menyebarkan informasi pembukaan beasiswa LPDP kepada seluruh pihak yang relevan dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak anggota masyarakat yang bisa mendapatkan kesempatan dalam pendaftaran beasiswa LPDP tahun 2025.

Dalam rangka mempertahankan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), LPDP berkomitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan dengan berprinsip pada nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Utama Lembaga LPDP



Ditandatangani secara elektronik  
Sudarto



Lampiran I  
Surat Plt. Direktur Utama LPDP  
Nomor : [@NomorND]  
Tanggal : [@TanggalND]

## **LAMPIRAN SURAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA**

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
3. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
4. Sekretaris Mahkamah Agung
5. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
6. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
7. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
8. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
9. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
10. Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak
11. Sekretaris Jenderal Komisi Ombudsman
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Sekretaris Negara
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
29. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
35. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



36. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
37. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital
38. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
39. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
40. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
41. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
42. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi
43. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
44. Sekretaris Jenderal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
45. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
46. Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara
47. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi
48. Sekretaris Jenderal Kementerian Usaha Kecil dan Menengah
49. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata
50. Sekretaris Jenderal Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
51. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga
53. Asisten Kejaksaan Agung
54. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
55. Asisten SDM Kepolisian RI (POLRI)
56. Sekretaris Umum Tentara Nasional Indonesia (PUSPEN TNI)
57. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)
58. Sekretaris Badan Kepegawaian Negara (BKN)
59. Sekretaris Badan Pusat Statistik (BPS)
60. Sekretaris Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
61. Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
62. Sekretaris Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
63. Sekretaris Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BNP2TKI)/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
64. Sekretaris Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
65. Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
66. Sekretaris Badan Standarisasi Nasional (BSN)
67. Sekretaris Utama Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES)
68. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)
69. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)
70. Sekretaris Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
71. Sekretaris Utama Dewan Ketahanan Nasional (WANTANAS)
72. Sekretaris Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
73. Sekretaris Utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

74. Ketua Bidang Administrasi Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
75. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
76. Sekretaris Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
77. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN)
78. Sekretaris Badan Narkotika Nasional (BNN)
79. Sekretaris Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
80. Sekretaris Badan Informasi Geospasial (BIG)
81. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
82. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
83. Sekretaris Badan Intelijen Negara (BIN)
84. Sekretaris Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/ Kementerian Investasi dan Hilirisasi
85. Sekretaris Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
86. Sekretaris Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
87. Sekretaris Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)
88. Sekretaris Jenderal Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
89. Kepala Sekretaris Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
90. Kepala Sekretaris BP Batam
91. Sekretaris Badan Karantina Pertanian

Lampiran II  
Surat Plt. Direktur Utama LPDP  
Nomor : [@NomorND]  
Tanggal : [@TanggalND]

## **LAMPIRAN SURAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Kabupaten Aceh Jaya
2. Kabupaten Aceh Besar
3. Kabupaten Simeulue
4. Kota Sabang
5. Kabupaten Klungkung
6. Kabupaten Bengkulu Utara
7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8. Kabupaten Bengkulu
9. Kabupaten Kapuas Hulu
10. Kabupaten Sambas
11. Kabupaten Sanggau
12. Kabupaten Sintang
13. Kabupaten Berau
14. Kabupaten Mahakam Ulu
15. Kabupaten Malinau
16. Kabupaten Nunukan
17. Kabupaten Bintan
18. Kabupaten Karimun
19. Kabupaten Kepulauan Anambas
20. Kabupaten Natuna
21. Kota Batam
22. Kabupaten Lampung Barat
23. Kabupaten Pesisir Barat
24. Kabupaten Buru
25. Kabupaten Buru Selatan
26. Kabupaten Kepulauan Aru
27. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
28. Kabupaten Maluku Barat Daya
29. Kabupaten Maluku Tengah
30. Kabupaten Maluku Tenggara
31. Kabupaten Seram Bagian Barat



32. Kabupaten Seram Bagian Timur
33. Kota Ambon
34. Kota Tual
35. Kabupaten Halmahera Barat
36. Kabupaten Halmahera Selatan
37. Kabupaten Halmahera Tengah
38. Kabupaten Halmahera Timur
39. Kabupaten Halmahera Utara
40. Kabupaten Kepulauan Sula
41. Kabupaten Pulau Morotai
42. Kabupaten Pulau Taliabu
43. Kota Ternate
44. Kota Tidore Kepulauan
45. Kabupaten Lombok Barat
46. Kabupaten Lombok Utara
47. Kabupaten Alor
48. Kabupaten Belu
49. Kabupaten Ende
50. Kabupaten Flores Timur
51. Kabupaten Kupang
52. Kabupaten Lembata
53. Kabupaten Malaka
54. Kabupaten Manggarai
55. Kabupaten Manggarai Barat
56. Kabupaten Manggarai Timur
57. Kabupaten Nagekeo
58. Kabupaten Ngada
59. Kabupaten Rote Ndao
60. Kabupaten Sabu Raijua
61. Kabupaten Sikka
62. Kabupaten Sumba Barat
63. Kabupaten Sumba Barat Daya
64. Kabupaten Sumba Tengah
65. Kabupaten Sumba Timur
66. Kabupaten Timor Tengah Selatan
67. Kabupaten Timor Tengah Utara
68. Kota Kupang

69. Kabupaten Biak Numfor
70. Kabupaten Jayapura
71. Kabupaten Keerom
72. Kabupaten Kepulauan Yapen
73. Kabupaten Mamberamo Raya
74. Kabupaten Sarmi
75. Kabupaten Supiori
76. Kabupaten Waropen
77. Kota Jayapura
78. Kabupaten Fakfak
79. Kabupaten Kaimana
80. Kabupaten Manokwari
81. Kabupaten Manokwari Selatan
82. Kabupaten Pegunungan Arfak
83. Kabupaten Teluk Bintuni
84. Kabupaten Teluk Wondama
85. Kabupaten Maybrat
86. Kabupaten Raja Ampat
87. Kabupaten Sorong
88. Kabupaten Sorong Selatan
89. Kabupaten Tambrauw
90. Kota Sorong
91. Kabupaten Jayawijaya
92. Kabupaten Lanny Jaya
93. Kabupaten Mamberamo Tengah
94. Kabupaten Nduga
95. Kabupaten Pegunungan Bintang
96. Kabupaten Tolikara
97. Kabupaten Yahukimo
98. Kabupaten Yalimo
99. Kabupaten Asmat
100. Kabupaten Boven Digoel
101. Kabupaten Mappi
102. Kabupaten Merauke
103. Kabupaten Deiyai
104. Kabupaten Dogiyai
105. Kabupaten Intan Jaya



106. Kabupaten Mimika
107. Kabupaten Nabire
108. Kabupaten Paniai
109. Kabupaten Puncak
110. Kabupaten Puncak Jaya
111. Kabupaten Bengkalis
112. Kabupaten Kepulauan Meranti
113. Kabupaten Donggala
114. Kabupaten Sigi
115. Kabupaten Tojo Una-Una
116. Kabupaten Toli-Toli
117. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
118. Kabupaten Kepulauan Sangihe
119. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
120. Kabupaten Kepulauan Talaud
121. Kabupaten Minahasa Utara
122. Kabupaten Kepulauan Mentawai
123. Kabupaten Musi Rawas Utara
124. Kabupaten Nias
125. Kabupaten Nias Barat
126. Kabupaten Nias Selatan
127. Kabupaten Nias Utara

Lampiran III  
Surat Plt. Direktur Utama LPDP  
Nomor : [@NomorND]  
Tanggal : [@TanggalND]

### **LAMPIRAN SURAT PIMPINAN PERGURUAN TINGGI**

1. Institut Agama Islam Negeri Manado
2. Institut Agama Islam Negeri Curup
3. Institut Agama Islam Negeri Kediri
4. Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
5. Institut Pertanian Bogor
6. Institut Seni Indonesia Denpasar
7. Institut Seni Indonesia Surakarta
8. Institut Seni Indonesia Yogyakarta
9. Institut Teknologi Bandung
10. Institut Teknologi Nasional Bandung
11. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
12. Monash University, Indonesia
13. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
14. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang
15. Politeknik Negeri Malang
16. Politeknik Negeri Sriwijaya
17. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
18. Sekolah Tinggi Manajemen Ppm
19. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
20. Universitas Ahmad Dahlan
21. Universitas Airlangga
22. Universitas Aisyiyah Yogyakarta
23. Universitas Andalas
24. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
25. Universitas Bengkulu
26. Universitas Bina Nusantara
27. Universitas Brawijaya
28. Universitas Ciputra
29. Universitas Darussalam Gontor
30. Universitas Dian Nuswantoro
31. Universitas Diponegoro
32. Universitas Gadjah Mada



33. Universitas Gunadarma
34. Universitas Halu Oleo
35. Universitas Hang Tuah
36. Universitas Hasanuddin
37. Universitas Hayam Wuruk Perbanas
38. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
39. Universitas Indonesia
40. Universitas Islam Bandung
41. Universitas Islam Indonesia
42. Universitas Islam Internasional Indonesia
43. Universitas Islam Malang
44. Universitas Islam Negeri Alauddin
45. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
46. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
47. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
48. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
49. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
50. Universitas Islam Negeri Mataram
51. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
52. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
53. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
54. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
55. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
56. Universitas Islam Negeri Salatiga
57. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
58. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
59. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
60. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
61. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
62. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
63. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
64. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
65. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
66. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
67. Universitas Islam Sultan Agung
68. Universitas Jambi
69. Universitas Jember

70. Universitas Jenderal Soedirman
71. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
72. Universitas Katolik Parahyangan
73. Universitas Katolik Soegijapranata
74. Universitas Komputer Indonesia
75. Universitas Kristen Duta Wacana
76. Universitas Kristen Maranatha
77. Universitas Kristen Petra
78. Universitas Kristen Satya Wacana
79. Universitas Lambung Mangkurat
80. Universitas Lampung
81. Universitas Mercu Buana
82. Universitas Muhammadiyah Jakarta
83. Universitas Muhammadiyah Makassar
84. Universitas Muhammadiyah Malang
85. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
86. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
87. Universitas Muhammadiyah Surakarta
88. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
89. Universitas Mulawarman
90. Universitas Multimedia Nusantara
91. Universitas Muslim Indonesia
92. Universitas Nasional
93. Universitas Negeri Gorontalo
94. Universitas Negeri Jakarta
95. Universitas Negeri Makassar
96. Universitas Negeri Malang
97. Universitas Negeri Medan
98. Universitas Negeri Padang
99. Universitas Negeri Semarang
100. Universitas Negeri Surabaya
101. Universitas Negeri Yogyakarta
102. Universitas Nusa Cendana
103. Universitas Padjadjaran
104. Universitas Pancasila
105. Universitas Pasundan
106. Universitas Pattimura

107. Universitas Pelita Harapan
108. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
109. Universitas Pendidikan Ganesha
110. Universitas Pendidikan Indonesia
111. Universitas Pertahanan
112. Universitas Presiden
113. Universitas Prima Indonesia
114. Universitas Riau
115. Universitas Sam Ratulangi
116. Universitas Sanata Dharma
117. Universitas Sebelas Maret
118. Universitas Sriwijaya
119. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
120. Universitas Sumatera Utara
121. Universitas Surabaya
122. Universitas Syiah Kuala
123. Universitas Tadulako
124. Universitas Tanjungpura
125. Universitas Tarumanagara
126. Universitas Telkom
127. Universitas Terbuka
128. Universitas Trisakti
129. Universitas Trunojoyo
130. Universitas Udayana

Lampiran IV  
Surat Plt. Direktur Utama LPDP  
Nomor : [@NomorND]  
Tanggal : [@TanggalND]

### **LAMPIRAN SURAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**

1. Gubernur Provinsi Aceh
2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
3. Gubernur Provinsi Sumatera Utara
4. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
5. Gubernur Provinsi Bengkulu
6. Gubernur Provinsi Riau
7. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
8. Gubernur Provinsi Jambi
9. Gubernur Provinsi Lampung
10. Gubernur Provinsi Bangka Belitung
11. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
12. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
13. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
14. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah
15. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
16. Gubernur Provinsi Banten
17. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
18. Gubernur Provinsi Jawa Barat
19. Gubernur Provinsi Jawa Tengah
20. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
21. Gubernur Provinsi Jawa Timur
22. Gubernur Provinsi Bali
23. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur
24. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
25. Gubernur Provinsi Gorontalo
26. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
27. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
28. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara
29. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
30. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
31. Gubernur Provinsi Maluku Utara



32. Gubernur Provinsi Maluku
33. Gubernur Provinsi Papua Barat
34. Gubernur Provinsi Papua
35. Gubernur Provinsi Papua Tengah
36. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
37. Gubernur Provinsi Papua Selatan
38. Gubernur Provinsi Papua Barat Daya